

Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Realisasi Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2020

Amalia Risti Rahyu¹, Safira Nur Zahira², Fitri Nur Fajri³

^{1,2}Universitas IslamBandung

Jalan Tamansari No.1, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
amaliaristii07@gmail.com; safiranurzahiraaa@gmail.com

³Universitas IslamBandung

Jalan Tamansari No.1, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
fitrinurfajri08@gmail.com

Abstrak— Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang memiliki tren yang positif pada tahun 2011-2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang sejalan dengan peningkatan upah minimum regional namun tidak sejalan dengan penurunan indeks pembangunan manusia pada tahun 2020. Selain itu, peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang tidak sejalan dengan tingkat kedalaman kemiskinan dan realisasi dana alokasi umum yang mengalami fluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum regional, indeks kedalaman kemiskinan, dan realisasi dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang pada tahun 2011-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah dengan analisis regresi menggunakan aplikasi *Eviews 10* sehingga jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel upah minimum regional memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan indeks kedalaman kemiskinan dan realisasi dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel upah minimum regional dan indeks kedalaman kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang sedangkan realisasi dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: IPM, UMR, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Realisasi DAU

I. PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator dalam mengukur aksesibilitas hasil pembangunan dalam peningkatan standar dan kualitas hidup manusia yang terdiri dari tiga dimensi yaitu a) Umur Panjang dan Hidup Sehat; b) Pengetahuan; c) Standar Hidup.

Negara-negara di dunia perlu untuk memperhatikan perkembangan manusia baik itu negara maju atau negara berkembang. Bagi negara maju yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tapi kurang berhasil dalam menangani masalah-masalah sosial seperti masalah penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga dan penyakit *AIDS* sedangkan jika di negara berkembang termasuk Indonesia berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi kurang berhasil dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi (Bhakti dan Suprpto, 2012). Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 71,94 persen tumbuh sebesar 0,03 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Angka tersebut masih berada pada level tertinggi karena berada pada kisaran $70 \leq \text{IPM} < 80$ (BPS, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), pertumbuhan IPM Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan jauh bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan mencapai 0,78 persen. Perlambatan IPM tersebut jelas terlihat karena pada periode tahun 2010-2019 capaian IPM di Indonesia tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Perlambatan pencapaian tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat standar hidup layak masyarakat Indonesia menurun. Namun jika melihat kondisi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 pertumbuhan IPM lebih cepat yaitu tumbuh sebesar 0,08 persen dibandingkan dengan IPM nasional. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai 72,09 persen dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,08 persen. Pertumbuhan IPM tersebut termasuk dalam pertumbuhan IPM terendah di Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan tahun 2019 namun lebih cepat dibandingkan dengan pencapaian IPM nasional yang mengalami pertumbuhan 0,03 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,74 persen. Selama periode tahun 2010-2020 rata-rata pertumbuhan IPM Jawa Barat tumbuh sebesar 0,89 persen dari pencapaian IPM tahun 2010 sebesar 66,15 persen dan pada tahun 2020 menjadi 72,09 persen (BPS, 2020).

Berbeda dengan Indonesia dan Jawa Barat, IPM di Kabupaten Karawang mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,20 persen menjadi 70, 66 persen. Selama tahun 2011-2019 IPM di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan yang berkelanjutan namun pada tahun 2020 IPM di Kabupaten Karawang menunjukkan penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Penurunan pada IPM tidak merubah status IPM Kabupaten Karawang di mana pada tahun 2019 sampai 2020 status IPM di Kabupaten Karawang masih tergolong tinggi. Kondisi IPM yang turun di Kabupaten Karawang sejalan dengan keadaan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2020 realisasi DAU Kabupaten Karawang sebesar Rp1.216.810.516 lebih kecil dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.325.136.134. Realisasi DAU ini sangat penting bagi daerah sebab dengan adanya realisasi DAU ini dapat meningkatkan standar hidup manusia, meningkatkan Pendidikan, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat. Realisasi DAU ini dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran kebutuhan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, masalah kemiskinan di suatu daerah tidak hanya mengenai jumlah kemiskinan yang tinggi atau rendah namun keadaan indeks kedalaman kemiskinan juga akan mempengaruhi bagaimana masalah kemiskinan tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan menandakan jika jumlah penduduk yang miskin semakin tinggi maka mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk dibawah garis kemiskinan semakin tinggi juga (Panggabean dan Matondang, 2019). Pada tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Karawang sebesar 1,28 persen lebih besar dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,06 persen. Indeks kedalaman kemiskinan yang meningkat ini mengindikasikan semakin banyak jumlah penduduk miskin yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa standar hidup untuk penduduk miskin semakin rendah dan dampaknya membuat kualitas hidup penduduk miskin atau kualitas sumber daya manusia semakin buruk maka akan mempengaruhi penurunan pada IPM. Pada tahun 2011- 2019 IPM di Kabupaten Karawang nilainya terus mengalami peningkatan namun kondisi indeks kedalaman kemiskinannya pada tahun tersebut tidak stabil ada kalanya naik secara signifikan dan setelahnya bisa turun secara signifikan.

Tabel 1. Data IPM, UMR, P1, dan Realisasi DAU Kabupaten Karawang Tahun 2010-2020

| TAHUN | IPM (%) | UMR (Rupiah) | P1 (%) | DAU (Rupiah) |
|-------|---------|--------------|--------|---------------|
| 2011 | 65,21 | 1.159.000 | 1,82 | 814.562.743 |
| 2012 | 65,97 | 1.269.227 | 1,59 | 1.004.178.461 |
| 2013 | 66,61 | 2.102.000 | 1,55 | 1.134.530.200 |

| | | | | |
|------|-------|-----------|------|---------------|
| 2014 | 67,08 | 2.447.450 | 1,54 | 1.188.478.470 |
| 2015 | 67,66 | 2.987.000 | 1,54 | 1.246.484.473 |
| 2016 | 68,19 | 3.330.505 | 1,87 | 1.250.725.634 |
| 2017 | 69,17 | 3.605.272 | 1,54 | 1.239.740.020 |
| 2018 | 69,89 | 3.919.291 | 1,21 | 1.245.521.327 |
| 2019 | 70,86 | 4.234.010 | 1,06 | 1.325.136.134 |
| 2020 | 70,66 | 4.594.324 | 1,28 | 1.216.810.516 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2021

Namun jika melihat keadaan Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Karawang keadaannya berbanding terbalik dengan realisasi DAU dan P1. Pada tahun 2020. Upah Minimum Regional di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun 2019 menjadi Rp4.594.324. Perkembangan UMR yang meningkat ini akan berdampak terhadap pendapatan yang meningkat. Jika pendapatan meningkat maka akan berdampak pada kemampuan masyarakat yang bekerja untuk meningkatkan konsumsi dalam hal pembelanjaan dan hal tersebut akan meningkatkan ekonomi secara keseluruhan dan berpengaruh terhadap peningkatan IPM karena standar hidup masyarakat meningkat.

Berdasarkan uraian diatas yang melatar belakangi penelitian ini kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang yang menurun pada tahun 2020 sejalan dengan realisasi DAU yang mengalami penurunan serta didukung oleh keadaan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang meningkat namun berbanding terbalik dengan keadaan UMR yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah Indeks Kedalaman Kemiskinan, realisasi DAU, dan UMR mempengaruhi penurunan IPM di Kabupaten Karawang.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Manusia merupakan kekayaan dari suatu negara dan peningkatan kualitas manusia menjadi fokus dalam suatu pembangunan. Pembangunan dikatakan upaya atau proses dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan biasanya meliputi perubahan di berbagai aspek seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika pembangunan merupakan suatu syarat mutlak dalam keberlangsungan di suatu negara (Kuncoro, 2010:117). Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan suatu pembangunan ekonomi meliputi kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*), yang beberapa hal tersebut merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat (Todaro, 2000:26).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam memperhitungkan dan melihat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Pada saat IPM tinggi berarti keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan meningkat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan jika fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk (Putra dan Ulupui, 2015; Lestari et al, 2016; dan Rivando et al, 2019). Indeks Pembangunan Manusia bertujuan mengukur seberapa besar pencapaian pembangunan manusia yang berbasis dari sejumlah komponen-komponen dasar kualitas hidup manusia. Sebagai tolak ukur dari kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui tiga dimensi pendekatan dasar, yaitu kehidupan yang layak, pengetahuan dan umur panjang, dan sehat oleh karena itu ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain (BPS, 2020).

2.2. Upah Minimum Regional

Upah merupakan kegiatan balas jasa yang diberikan suatu perusahaan atau organisasi kepada pekerja dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan upah minimum regional dibagi menjadi dua, yaitu upah minimal (sejumlah upah yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang upah tersebut). Ketentuan upah minimum merupakan suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan usulan atau masukan dari komisi pengupahan dan jaminan sosial dari dewan ketenagakerjaan daerah tentang keharusan perusahaan dalam membayar jumlah upah kepada pekerja yang memiliki tingkatan paling rendah (Kertonegoro, 2000:54). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sania et al (2021) adanya peningkatan UMR di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang tinggi sehingga kedua hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan IPM selama periode 2014-2019 karena akan meningkatkan

kualitas hidup. Peningkatan pada Upah Minimum Regional (UMR) akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang berdampak pada kemampuan para pekerja untuk meningkatkan konsumsi pembelanjaan, dan pada nantinya akan terjadi peningkatan ekonomi secara agregat sehingga dapat dikatakan jika peningkatan pada UMR akan berpengaruh terhadap peningkatan IPM (Kiha et al, 2021).

2.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pusat ke daerah yang bertujuan dalam memberikan peningkatan pelayanan daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup sehat dengan harapan hidup yang lebih panjang (Lestari et al, 2016). Besaran penerima dana alokasi umum yang diterima daerah ditentukan oleh nilai indeks pembangunan manusia (BPS, 2017).

Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap IPM sehingga ketika penerimaan DAU mengalami peningkatan maka kesejahteraan masyarakatnya akan mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan angka IPM (Rivando et al, 2019 dan Maria et.al,2019). Hal tersebut pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juliarini (2019) bahwa di seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan hubungan pendapatan daerah memiliki korelasi positif dan sangat kuat terhadap IPM maka dapat disimpulkan jika Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015) bahwa Rasio DAU tidak mampu meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Timur.

2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Bank Dunia (*World Bank*) menjelaskan penyebab dari kemiskinan salah satunya adalah pendapatan aset yang kurang (*Lack of Income and Assets*) dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang diterima. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan gambaran mengenai besaran kesenjangan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Panggabean & Matondang (2019) dikatakan bahwa Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin tinggi maka akan berdampak pada penurunan kualitas standar hidup penduduk miskin dan pada akhirnya akan berdampak pada IPM. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al (2019) IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Merangin.

Pengaruh tingkat kedalaman kemiskinan terhadap IPM dapat dikatakan jika tingkat kedalaman kemiskinan yang menurun tajam merupakan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dan tingkat kedalaman kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Wahyuni et al, 2021).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain (Suharyadi dan S.K, 2018:15). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang yang melibatkan data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Karawang periode tahun 2011 sampai dengan 2020. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena data yang digunakan merupakan data berbentuk angka (Suharyadi & S.K, 2018:14). Penelitian ini dilakukan dengan analisis data *time series* yang diolah menggunakan aplikasi *Eviews 10* yang berupaya untuk menganalisis hubungan antara UMR, P1, dan realisasi DAU terhadap tingkat IPM di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan metode untuk membangun persamaan yang terdiri dari variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) (Suharyadi dan S.K, 2018:163). Berikut ini persamaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMR_{it} + \beta_2 P1_{it} + \beta_3 RDAU_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia
- $\beta_{0,1,2,3}$ = Koefisien Regresi
- UMR = Upah Minimum Regional
- P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan
- RDAU = Realisasi Dana Alokasi Umum
- e = *Standar Error*

Setelah mengetahui model penelitian yang akan digunakan maka akan dilakukan uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah memenuhi asumsi-asumsi linear berganda (Suharyadi dan S.K, 2018:247). Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, uji normalitas, dan uji multikolinieritas. Uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan uji F untuk melihat apakah model yang digunakan layak atau tidak, uji t untuk melihat signifikansi setiap variabel bebas, dan koefisien determinasi untuk melihat besaran pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Ketika akan melakukan analisis regresi linear berganda maka diperlukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah model atau persamaan yang digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi linear berganda. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, uji normalitas, dan uji multikolinieritas. Berikut hasil regresi linear berganda antara UMR, P1, dan RDAU terhadap IPM :

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi, UMR, P1, dan Realisasi DAU terhadap IPM di Kabupaten Karawang Periode 2011-2020

| Variabel | Koefisien | Std. Error | t-Statistic | Prob |
|------------|-----------|---------------|-------------|--------|
| IPM | 67.27712 | 1.486629 | 45.25481 | 0.0000 |
| UMR | 1.47E-06 | 1.72E-07 | 8.579156 | 0.0001 |
| P1 | -1.642431 | 0.529153 | -3.103888 | 0.0210 |
| RDAU | -9.03E-10 | 1.23E-09 | -0.734954 | 0.4901 |
| FStatistic | 127.0307 | R-squared | 0.984500 | |
| Prob | 0.000008 | Adj.R-squared | 0.976750 | |

Sumber : Diolah dari Hasil *Eviews 10*

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk melihat arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.. Variabel independen terdiri dari UMR, P1, dan realisasi DAU sedangkan variabel dependen adalah IPM. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Berikut persamaan yang diperoleh dari hasil estimasi regresi :

$$IPM = 67,26 + 1,47UMR - 1,64P1 - 9,03RDAU \tag{2}$$

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi maka diperoleh nilai konstanta sebesar 67,26 persen artinya IPM sebesar 67,26 persen apabila variabel UMR, P1, dan realisasi DAU bernilai nol. Koefisien sebesar 1,47 pada variabel UMR artinya apabila UMR meningkat sebanyak 1 rupiah maka akan meningkatkan IPM sebanyak 1,47 persen karena hubungan antara IPM dan UMR positif sehingga ketika UMR meningkat maka IPM akan meningkat. Berbeda halnya untuk variabel P1 dan RDAU mempunyai hubungannya negatif dengan IPM. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memiliki koefisien sebesar -1,64 artinya apabila P1 meningkat sebesar 1 persen maka IPM akan berkurang sebesar 1,64 persen dan sama halnya dengan variabel realisasi DAU (RDAU) dengan koefisien -9,03 persen artinya jika realisasi DAU naik sebesar 1 rupiah maka IPM akan berkurang sebesar 9,03 persen.

Setelah mendapatkan model atau persamaan yang akan digunakan maka dilakukan uji asumsi klasik. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji asumsi klasik penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

| Uji Autokorelasi | |
|--------------------------------|-----------|
| <i>F-statistic</i> | 0.232243 |
| <i>Obs*R-squared</i> | 1.040404 |
| Uji Heteroskedastisitas | |
| <i>F-statistic</i> | 0.687676 |
| <i>Obs*R-squared</i> | 2.558628 |
| <i>Scaled explained SS</i> | 0.266199 |
| Uji Linearitas | |
| <i>t-statistic</i> | 0.2184 |
| <i>F-statistic</i> | 0.2184 |
| Uji Normalitas | |
| <i>Jarque-Bera</i> | 0,854219 |
| <i>Probability</i> | 0,652392 |
| Uji Multikolinieritas | |
| <i>Centered VIF</i> | |
| IPM | NA |
| UMR | 4,217,487 |
| P1 | 1,805,700 |
| RDAU | 3,426,290 |

Sumber : Diolah dari Hasil *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model atau persamaan yang akan digunakan telah memenuhi hipotesis-hipotesis setiap uji asumsi klasik sehingga dapat dikatakan bawah model atau persamaan yang akan digunakan tidak bias dan konsisten. Selanjutnya untuk mengetahui apakah model atau persamaan yang akan digunakan layak atau tidak serta mengetahui signifikansi antar variabel dan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Tingkat signifikan yang digunakan dalam uji F dan uji t yaitu $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Berikut merupakan hasil uji F, uji t, dan koefisien determinasi :

Tabel 4. Hasil Uji F, Uji t, dan Koesfisien Determinasi

| Uji F | |
|------------------------------|----------|
| <i>Prob(F-statistic)</i> | 0,000008 |
| Uji t | |
| <i>Prob. t hitung</i> | |
| UMR | 0,0001 |
| P1 | 0,0210 |
| RDAU | 0,4901 |
| Koefisien Determinasi | |
| R^2 | 0,984500 |

Sumber : Diolah dari Hasil *Eviews 10*

Berdasarkan hasil uji F diketahui nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000008 lebih kecil dari tingkat signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh UMR, P1, dan realisasi DAU terhadap IPM di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel UMR dan P1 berpengaruh secara signifikan terhadap IPM karena memiliki nilai *prob. t* hitung lebih kecil dari tingkat signifikan namun variabel realisasi DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM karena memiliki *prob. t* hitung lebih besar dari tingkat signifikan. Hasil koefisien determinasi R^2 sebesar 0.984500 artinya fluktuasi IPM sebesar 98 persen dipengaruhi oleh UMR, P1, dan realisasi DAU dan 2 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel UMR, P1, dan realisasi DAU.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan variabel UMR memiliki hubungan positif terhadap IPM. Ketika UMR naik sebesar 1 rupiah maka IPM akan meningkat sebesar 1,47 persen. Koefisien yang bertanda positif dari persamaan model menandakan hubungan searah jadi jika UMR meningkat maka IPM meningkat juga. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sania et al (2021) bahwa perkembangan UMR yang meningkat untuk setiap tahunnya akan membawa kepada peningkatan pendapatan. Pendapatan yang meningkat tersebut akan mengakibatkan para pekerja untuk meningkatkan kemampuan belanjanya. Dengan demikian akan lebih banyak kebutuhan para pekerja yang terpenuhi dan hal tersebut akan berefek terhadap IPM karena standar hidup manusia akan meningkat sehingga kualitas hidup manusia akan jauh lebih baik. Selain itu, menurut Rosyadah (2021), UMR yang meningkat di suatu daerah membuat kebutuhan para buruh terpenuhi baik kebutuhan sosial atau kebutuhan dasar pangan maupun nonpangan sehingga kesejahteraan para buruh akan meningkat dan akan berefek terhadap nilai IPM yang lebih baik. Sama halnya dengan hasil analisis dan para peneliti lain UMR di Kabupaten Karawang pada tahun 2011-2020 nilainya selalu meningkat dan hal tersebut sejalan dengan keadaan IPM pada tahun tersebut angkanya selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 keadaan IPM Kabupaten Karawang mengalami penurunan sebesar 0,20 persen menjadi 70,66 persen lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 70,86 persen. Nilai IPM yang turun tersebut keadaannya berbanding terbalik dengan UMR. Pada tahun 2020 UMR di Kabupaten Karawang justru mengalami peningkatan sebesar Rp360.314 menjadi Rp4.594.324. Penyebab IPM yang turun tersebut salah satunya karena ada pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan akibat produksi yang turun (Amaliya dan Gunawan, 2021).

Hasil analisis dan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa UMR dan IPM mempunyai hubungan yang searah jadi ketika UMR naik maka IPM juga meningkat karena dengan adanya upah yang mengalami peningkatan akan membuat hidup lebih sejahtera dan kualitas hidup juga mengalami peningkatan. Namun, keadaan IPM dan UMR tahun 2020 di Kabupaten Karawang sedikit berbeda. IPM Kabupaten Karawang mengalami penurunan dan UMR sebaliknya mengalami peningkatan. IPM yang menurun karena dampak dari pandemi yang membuat perekonomian mengalami kontraksi sehingga kualitas hidup manusia juga menurun. Namun, saat UMR tahun 2020 ditetapkan bisa dikatakan belum memperkirakan kondisi pandemi Covid-19 sebab UMR pada tahun 2020 ditetapkan sekitar bulan November di tahun 2019 dan Covid-19 terkonfirmasi pada bulan Desember tahun 2019 (CNCB.com, 2019). Oleh karena itu, kondisi perekonomian Kabupaten Karawang sebelum pandemi cenderung stabil karena penetapan UMR pada tahun 2020 masih menggunakan aturan lama yaitu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan rumus UMR menggunakan variabel inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum yang akan ditetapkan dan upah minimum pada tahun yang berjalan. Kondisi perekonomian Kabupaten Karawang pada tahun 2019 dapat dikatakan stabil dengan nilai laju pertumbuhan ekonominya sebesar 4,08 persen dan inflasi sebesar 3,13 persen (BPS Kabupaten Karawang, 2020). Selain itu, meskipun UMR mengalami peningkatan tapi pengeluaran per kapita di Kabupaten Karawang menurun dari Rp11.856,00 pada tahun 2019 menjadi Rp11.315,00 pada tahun 2020 maka dari itu IPM juga mengalami penurunan karena pengeluaran perkapita adalah salah satu komponen dari IPM untuk menghitung standar hidup layak masyarakat (BPS Kabupaten Karawang, 2020).

Kondisi IPM yang turun di Kabupaten Karawang sejalan dengan keadaan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil regresi diketahui jika realisasi DAU naik sebesar 1 rupiah maka IPM akan berkurang sebesar 9,03 persen. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015) bahwa Rasio DAU tidak

dapat meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Timur. Namun pada penelitian (Rivando et al, 2019 dan Maria et.al,2019) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap IPM sehingga ketika penerimaan DAU mengalami peningkatan maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan yang berpengaruh terhadap peningkatan angka IPM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliarini (2019) bahwa seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan hubungan jika pendapatan daerah memiliki korelasi positif dan sangat kuat terhadap IPM maka dapat disimpulkan jika Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 sebesar Rp1.216.810.516.

Menurut BPS (2020) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu alokator dalam menentukan IPM selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, jadi seharusnya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun kondisi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Karawang tahun 2020 kondisinya berbeda, yakni memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Karawang. Hal ini disebabkan belanja pegawai di Kabupaten Karawang Rp1.717.385.649.152 lebih besar dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.216.810.516 (Karawangkab.go.id). Besarnya belanja pegawai daripada Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) belum sepenuhnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Karawang karena Dana Alokasi Umum (DAU) masih dipengaruhi oleh anggaran dasar yang masih digunakan untuk belanja pegawai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016) bahwa jika Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap IPM artinya pemerintah lebih fokus terhadap belanja pegawai daripada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Karawang, hal tersebut sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa ketika indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan maka IPM akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil regresi ketika indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka IPM akan mengalami penurunan sebesar 1,64 persen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al (2021) yang menemukan bahwa ketika indeks kedalaman kemiskinan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bireuen di mana ketika tahun 2017-2019 indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan yang tajam dan diiringi dengan peningkatan IPM yang cukup signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu antara indeks kedalaman kemiskinan dan IPM di Kabupaten Merangin memiliki hubungan yang positif. Ketika IPM mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka indeks kedalaman kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen. Namun, keadaan tersebut berbeda dengan Kabupaten Karawang di mana indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Karawang cenderung mengalami penurunan pada tahun 2011-2014 lalu mengalami masa stagnan pada tahun 2014-2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 lalu turun kembali hingga tahun 2019 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 1,21 persen akibat pandemi Covid-19. Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan predikat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang ekstrem di Jawa Barat, hal tersebut disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19 (Kompas.com, 2021). Sebelum adanya pandemi Covid-19 Kabupaten Karawang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan di mana rata-rata penduduk miskin tersebut berprofesi sebagai buruh dan buruh lepas tani yang memiliki pendapatan rendah (Merdeka.com, 2018). Peningkatan pada angka indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa semakin dalam ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin maka akan berpengaruh terhadap standar hidup penduduk miskin yang semakin rendah sehingga memengaruhi peningkatan IPM (Panggabean dan Matondang, 2019).

Tingginya angka indeks kedalaman kemiskinan pun dipengaruhi oleh tingkat garis kemiskinan. Menurut BPS garis kemiskinan menunjukkan jumlah yang dibutuhkan oleh penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan nonmakanan. Semakin banyak penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata di bawah garis kemiskinan maka semakin banyak penduduk miskin sehingga mempengaruhi tingkat indeks kedalaman kemiskinan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda untuk mengetahui faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator dalam mengukur aksesibilitas hasil pembangunan dalam peningkatan standar dan kualitas hidup manusia. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan variabel UMR dan Indeks kedalaman kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM sedangkan variabel realisasi Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Upah Minimum Regional memiliki hubungan positif terhadap IPM. Indeks kedalaman kemiskinan dan realisasi dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan penelitian kami diketahui bahwa alokasi terbesar dari DAU berada pada bagian belanja pegawai daripada pengeluaran untuk peningkatannya infrastruktur atau pelayanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis berharap untuk pemerintah Kabupaten Karawang fokus dalam meningkatkan IPM terutama dari alokasi DAU karena salah satu penentu DAU adalah kondisi IPM di daerah tersebut serta terdapat penelitian lebih lanjut mengenai kondisi realisasi DAU terhadap kondisi IPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., Hidayat, M. S., & Umiyati, E. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Merangin. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 53–64.
- Amaliya, L., & Gunawan, R. (2021). Dampak Penurunan Ekonomi karena Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Kriminalitas Di Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang dalam Perspektif Kriminologi. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian. Universitas Buana Perjuangan Karawang*: 1147-1159.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia. Diakses 25 November 2021, dari [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- _____. (). Indeks Kedalaman Kemiskinan. Diakses 25 November 2021, dari [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal ekonomi dan keuangan*, 18(4), 452-469.
- Dewi, G. Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Target Pendapatan Daerah (Survei Pada Kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah). *Katalogis*, 1(1).
- Farhan, F. (2021, Oktober 4). Soal Kemiskinan Ekstrem di Karawang, Kepala BPS: Justru Bagus, Ada Tindak Lanjut Pemda. *KOMPAS.com*. [Soal Kemiskinan Ekstrem di Karawang, Kepala BPS: Justru Bagus, Ada Tindak Lanjut Pemda Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com)
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum** BPK. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Diakses 27 Desember 2021, dari [PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan \[JDIH BPK RI\]](https://www.jdi.hukum.go.id)
- Juliarini, A. (2019). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 934-957.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Seuk, G. (2021). Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Nusa Tenggara Timur. *INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 41-56.
- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2016). Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kabupaten / Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *DINAMIC : Directory Journal of Economic Volume*, 1(1), 100-113.
- Maria, E., Halim, A., & Luthfan, M. (2019). Dana Perimbangan dan Pembangunan Manusia: Sebuah Bukti Empiris dari Pulau Kalimantan. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(3), 1-15.
- Motip, S. W., Purnamasari, H. P., & Azijah, A. N. (2020). Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota: Studi Implementasi Pada Perusahaan Di Kabupaten Karawang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(3), 71-78.

- Panggabean, M., & Matondang, E. R. L. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017. *Prosiding SATIESP*: 154-164.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2020). Data Rancangan Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2020. Diakses paada 1 Januari 2021, dari [Data Rancangan Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2020 | Situs Resmi - Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang \(karawangkab.go.id\)](https://www.karawangkab.go.id)
- Putra, P. G., & Ulupui, I. G. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(3), 863-877.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1-17.
- Rosyadah, J. A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *EFFICIENT: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1080-1092.
- Salam, B. (2018, November 29). BPS: 10,25 Persen Warga Karawang Hidup Miskin. Merdeka.com. [BPS: 10,25 Persen Warga Karawang Hidup Miskin | merdeka.com](https://www.merdeka.com)
- Sania, L., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Bharanomics*, 2(1), 33-46.
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. (2018). Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54-63.
- Suharyadi, & S.K, P. (2018). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 1 Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ dan _____. (2018). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 2 Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendra. (2019, November 20). Rekor Lagi! UMK 2020 Karawang Rp 4,59 Juta, Tertinggi di RI. [Rekor Lagi! UMK 2020 Karawang Rp 4,59 Juta, Tertinggi di RI \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com)
- Wahyuni, S., Rahmah, S., Maritalia, D., & Amalia, A. (2021). Pengaruh Pengeluaran Dana Persalinan Dan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bireuen. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(1), 29-41.